

Pelaporan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan

Faisal Rahman Dongoran¹, Andini Eka Pratiwi²,

Debi Anggiani Pohan³, Fitri Yoanda Ramadhani⁴, Rahma Diana Fadhillah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email : faisalrahman@umsu.ac.id¹, andiniekapратиwi17@gmail.com²,

debipohan88@gmail.com³, yoandaramadhani@gmail.com⁴, rahmadianafadilla@yahoo.com⁵

Abstrak

Pembiayaan pendidikan menjadi salah satu kunci penentu kualitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, perlu dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam konteks penelitian ini, ditelaah secara komprehensif dari aspek pelaporan dan pengendalian pembiayaan pendidikan. Untuk menganalisis topik tersebut, maka digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Proses pengumpulan data dan pengecekan keabsahan menggunakan data dari sumber kredibel, meliputi *Google Scholar*, *SINTA*, *DOAJ* dan *tandfonline*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi aspek biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Mendukung hal ini, dibutuhkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang terukur, meliputi penyusunan Rencana dan Pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, sebagai data awal proses penyusunan anggaran (*budget*). Dengan demikian, pengelolaan semua jenis keuangan, termasuk usaha yang memperoleh atau mengumpulkan dana untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkendali dengan efektif dan efisien di sekolah.

Kata Kunci: *Efektivitas Anggaran, Kualitas Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan.*

Reporting and Controlling Education Financing

Abstract

Education financing is one of the key determinants of the quality of education provision. For this reason, it needs to be managed in an appropriate and targeted manner. In the context of this research, the aspects of reporting and controlling education financing are comprehensively examined. To analyse the topic, a qualitative approach with a literature study method was used. The process of data collection and validity checking uses data from credible sources, including Google Scholar, SINTA, DOAJ and tandfonline. The results of this study concluded that education financing includes aspects of investment costs, operational costs, and personal costs. Supporting this, measurable education financing planning is needed, including the preparation of the School Revenue and Expenditure Budget Plan and Development, as the initial data for the budgeting process. Thus, the management of all types of finance, including efforts that obtain or collect funds to finance educational programme activities or activities, both directly and indirectly, is controlled effectively and efficiently in schools.

Keywords: *Budget Effectiveness, Education Quality, Education Financing.*

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini sudah menjadi kebutuhan. Sebagaimana kebutuhan lainnya maka manusia tentunya berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Banyak orang tua yang menyiapkan dana pendidikan dari sejak dini untuk pendidikan anak-anak mereka (Musthofa, *et.al.*, 2022). Pada awal tahun pelajaran orang tua menyiapkan semua kebutuhan anak-anak mereka untuk masuk sekolah, mulai dari menyiapkan seragam sekolah, buku, sepatu bahkan uang pangkal masuk sekolah karena pada sekolah tertentu ada uang pangkal berupa uang bangunan (Yusuf, 2023; Assingkily, 2021).

Kemampuan ekonomi setiap orang tidak sama, maka ada orang tua hanya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka hanya sampai sekolah dasar, ada yang mampu sampai ke sekolah menengah pertama dan atas, dan ada juga yang mampu sampai ke jenjang pendidikan tinggi (Ginanjari & Purwanto, 2022). Tetapi masih ada juga orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka meskipun hanya sekolah dasar (Nurhakim, 2023; Ariga, 2023).

Selain tanggung jawab orang tua, pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan". Untuk menjalankan amanat tersebut pemerintah telah melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional telah ditentukan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, semuanya adalah untuk mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia (Nafisah & Widiyanto, 2017).

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia saja melainkan juga ditentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nurdiyanti, 2021). Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satu pihak saja, maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi (Futaqi & Machali, 2019).

Pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri beberapa komponen, yaitu guru, tenaga administrasi, siswa dan sarana prasarana pendukung pendidikan itu sendiri. Komponen yang ada dalam sistem tersebut tidak dapat terpisah satu dengan yang lain dan saling menentukan satu sama lain (Hastina, *et.al.*, 2020; Busni, 2022). Komponen yang ada dalam sistem pendidikan memiliki fungsi masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pendidikan akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan tentang bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan, terutama dari aspek pelaporan dan pengendalian pembiayaan pendidikan pada satuan lembaga pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah mengulas dan menelaah terkait pelaporan dan pengendalian pembiayaan pendidikan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan konseptualitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. Untuk memperoleh data, digunakan metode pencarian data pada laman kredibel, memilah data, dan mengkroscek data

menggunakan sumber data terpercaya. Adapun laman kredibel meliputi *google scholar*, *DOAJ* dan *SINTA* (Assingkily, 2021). Adapun data yang dimaksud diambil dari publikasi ilmiah, meliputi buku, artikel, prosiding dan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi). Dengan demikian, data yang terkumpul dapat dianalisis secara komprehensif dan menjurus pada topik yang dibahas dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (Rahmadoni, 2018). Lebih lanjut, pembiayaan pendidikan dalam pengertian ini, yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. karena pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat (Supriadi, 2001; Hasbullah, 2010). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Huriah, 2014).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas *outcome* sesuai rencana), dan efisiensi (kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara masukan/input (pikiran, waktu, dan biaya) dan keluaran/output/hasil, di mana pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya: (1) Perencanaan, menentukan apa yang harus terjadi di masa depan, pembentukan rencana kegiatan; (2) Pengorganisasian, membuat terjadi penggunaan optimal sumber daya untuk mencapai sasaran; (3) Pelaksanaan, menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan (4) Pengendalian dan pemantauan, memeriksa proses dibanding rencana, melakukan modifikasi rencana dan kegiatan selanjutnya (Hoesada, 2013).

Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu *pertama* pembiayaan pendidikan di Sekolah Swasta, yaitu pembiayaan pendidikan dari Swasta maksudnya biaya pendidikan dari swasta yakni biaya yang disumbangkan masyarakat (individu, perusahaan, lembaga nonpemerintah, dan lainnya) ke sekolah (Fatimah, 2020). Misalnya PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya.

Pembiayaan pendidikan dari masyarakat, di mana biaya pendidikan dari masyarakat meliputi: sumbangan orang tua siswa, sumbangan perusahaan/swasta, dan lainnya. Sumbangan orang tua siswa yang dimaksud adalah dana yang disumbangkan langsung ke sekolah oleh orang tua siswa atau dikenal dengan dana komite sekolah. Dana tersebut terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan iuran atau dana Operasional Pendidikan (DOP).

Kedua, pembiayaan pendidikan di sekolah negeri. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Pusat yaitu dijelaskan menurut Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana

perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) (Supriadi, 2004). Menurut UU No.25 tahun 1999 tentang keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan. Biaya dari pemkab/pemkot lainnya adalah dana beasiswa untuk siswa dan dana subsidi untuk penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional.

Menurut Usman & Zahri (2012), pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba di masa mendatang (Sianturi, *et.al.*, 2020). Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Panuntun (2018), pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Jadi pendidikan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan direncanakan guna mewujudkan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan berakhlak mulia sehingga berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Herawan, 2011). Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Menurut Habsyi (2016) pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan,

hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah (Uviyanti & Pramuka, 2020). Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan (Bastian, 2006). Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.

Pembiayaan Pendidikan: Tinjauan Aspek Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Mulyani & Mulyadi, 2018).

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD (Ritonga, 2021). Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 Pasal 31 "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang layak (Syukri, *et.al.*, 2024). Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Ariskawanti & Munastiwi, 2022). Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Sari & Siregar, 2021). Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi, *pertama*, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; *kedua*, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan *ketiga*, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.

Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu *Pertama*, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. *Ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi aspek biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Mendukung hal ini, dibutuhkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang terukur, meliputi penyusunan Rencana dan Pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, sebagai data awal proses penyusunan anggaran (*budget*). Dengan demikian, pengelolaan semua jenis keuangan, termasuk usaha yang memperoleh atau mengumpulkan dana untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkendali dengan efektif dan efisien di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariga, S. (2023). Konsepsi Islam tentang Peserta Didik. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 194-199. <https://www.zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/155>.
- Ariskawanti, E., & Munastiwi, E. (2022). Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Ma'arif Wadaslintang. *Pendidikan Riset Dan Konseptual*, 6(3), 442-450.

- http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual/article/view/520.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Assingkily, M. S. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam (Mengulas Pendekatan Pendidikan Islam dalam Studi Islam & Hakikat Pendidikan Bagi Manusia)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Busni, R. (2022). Analisis Manajemen Kelembagaan Jenjang Pendidikan Dasar. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(2), 82-86. <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/50>.
- Fatimahh, S. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di RA Mambaul Ulum Sumurgung Montong Tuban. *Al Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education (IJECE)*, 4(1), 22-31. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/ijecie/article/view/114>.
- Futaqi, S., & Machali, I. (2019). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 231-256. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/view/2228>.
- Ginanjar, M. H., & Purwanto, E. (2022). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 67-84. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/view/2024>.
- Habsyi, I. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Smp Negeri 13 Kota Ternate. *Edukasi*, 14(2). <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/199>.
- Hasbullah, H. (2010). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hastina, H., Safiltri, D. A., Ramadhan, R., & Andika, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(2). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/873>.
- Herawan, E. (2011). Pengendalian mutu pendidikan: konsep dan aplikasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/IAPSPs/article/view/6384>.
- Hoesada, J. (2013). *Taksonomi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Huriyah, L. (2014). *Manajemen Keuangan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI.
- Mulyani, H., & Mulyadi, A. (2018). Model Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 29-40. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpak/article/view/15829>.
- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64-76. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/46994>.
- Nafisah, D., & Widiyanto, W. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788-797. <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/20316>.
- Nurdiyanti, Y. (2021). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*, 5(2), 167-185. <https://ojs.unida.ac.id/JTM/article/view/4538>.

- Nurhakim, H. Q. A. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 22(2), 303-313. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/1307>.
- Panuntun, S. (2018). PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH MELALUI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 86-102. <https://ejournal.unisnu.ac.id/II/article/view/1817>.
- Rahmadoni, J. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Indonesian Creative School Pekanbaru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2), 161-169. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/1855>.
- Ritonga, N. A. (2021). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MTs AR-RAUDHAH KARIMUN KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Mumtaz*, 1(1), 26-32. <http://ejournal.stitmumtaz.ac.id/index.php/mumtaz/article/view/1>.
- Sari, P., & Siregar, F. Y. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02), 460853. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/2852/pdf>.
- Sianturi, E., et.al. (2020). *Bunga Rampai: Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Supriadi, D. (2001). *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Supriadi, D. (2004). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syukri, M., Melisawati, S., Fatma, D., & Renanda, R. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 605-617. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/IIWP/article/view/8029>.
- Usman, N., & Zahri, C. (2012). Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(1). <https://jurnal.usk.ac.id/JAP/article/view/2458>.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 471-480. <https://core.ac.uk/download/pdf/328114208.pdf>.
- Yusuf, M. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(1), 16-23. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JMP-DMT/article/view/13369>.